

## **PENGARUH INVESTASI SWASTA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA PALOPO**

**Sri Wahyuni Mustafa**

***Abstract:** This study aims to determine the effect of private investment on employment in the tourism sector in Palopo City. Labor and unemployment are one of the complex problems that are currently a concern for the government, not apart from the Government of Palopo City. Absorption of labor in the tourism sector in the City of Palopo can provide inspiration for the government especially in the tourism sector so that investors are interested in investing in the City of Palopo. Investment is one of the economic activities that is able to absorb real labor, especially in the tourism sector. With the knowledge of the absorption of labor in the tourism sector, the government is expected to further improve the tourism sector in Palopo City so that the number of unemployed will decrease because it has been absorbed in the tourism sector. This study uses multiple regression analysis methods and all data in this study are macro in nature, using secondary data (time series) that are quantitative. The estimation results show that private investment has a positive and significant effect on the performance of the tourism sector in Palopo City.*

***Keywords:** Private Investment, Labor Absorption, Tourism, Palopo City*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata di Kota Palopo. Tenaga kerja dan pengangguran merupakan salah satu masalah kompleks yang saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah, tak terlepas bagi Pemerintah Kota Palopo. Penyerapan tenaga kerja pada sektor wisata di Kota Palopo dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah khususnya di sektor wisata sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Palopo. Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara nyata khususnya di sektor wisata. Dengan diketahuinya penyerapan tenaga kerja di sektor wisata, maka pemerintah diharapkan akan lebih memperbaiki sektor pariwisata di Kota Palopo sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang karena telah terserap di sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda serta seluruh data dalam penelitian ini adalah bersifat makro, menggunakan data sekunder (time series) yang bersifat kuantitatif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sektor pariwisata di Kota Palopo.

**Kata kunci:** Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja, Pariwisata, Kota Palopo

<sup>1</sup>e-mail: [wahyunilecture@gmail.com](mailto:wahyunilecture@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional yang mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat/penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor wisata di Kota Palopo dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah yang mana dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, khususnya di sektor wisata sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Palopo. Investasi juga merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara nyata khususnya di sektor wisata. Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Purwati, 2014).

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane dalam Sadono 1995). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kota Palopo sebagai salah satu kota administratif di Propinsi Sulawesi Selatan yang saat ini berusaha untuk mengembangkan sektor pariwisata dibawah naungan Dinas Pariwisata Kota Palopo. Dalam pengembangannya ini, tentu Pemerintah Kota Palopo harus meningkatkan iklim investasi dan untuk mendukung peningkatan sektor wisata, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor wisata juga lebih meningkat.

Proses penyerapan tenaga kerja dengan peningkatan output memerlukan waktu. Namun sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan ekonomi yang semakin berat pada negara berkembang ternyata penciptaan lapangan kerja baru belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan pengangguran. Perluasan industri pariwisata guna meningkatkan output tidak dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan industri pariwisata yang berkembang masih mencirikan padat modal daya serap terhadap tenaga kerja juga terbatas (Todaro, 2009).

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Investasi Swasta**

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agrerat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (Sukirno, 2008)

Menurut Keynes, bahwa determinasi utama investasi adalah *marginal efficiency of capital* (MEC), yaitu ukuran tentang tingkat keuntugan yang diharapkan dari suatu investasi atau suatu tingkat diskonto yang menyamakan the present value penerimaan investasi di masa depan dengan *supply price* investasi tersebut. Dewasa ini juga semakin kuat kebutuhan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk semakin menaruh perhatian pada pengeluaran sosial tersebut yang komponen utamanya adalah pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Dari hasil estimasi diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik

untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat pada berkurangnya tingkat kemiskinan. Variabel lain yang diintroduksikan, yakni investasi swasta dan distribusi pendapatan secara umum ditemukan berpengaruh kuat terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan.

Dalam manajemen anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Disatu sisi, pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun disini lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersediannya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kata lain sesungguhnya terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomidan pembangunan manusia (Mankiwet *al*, 2013).

Dalam kasus Indonesia, seperti disebutkan dalam *Indonesian Human Development Report 2004*, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor wisata selama ini jauh lebih sedikit dibandingkan Malaysia, Thailand ataupun negara negara yang berkembang lainnya.

Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor wisata menjadi kian terasa sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan melorotnya capaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk kepada tingkat kemiskinan. Sementara itu, selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam meningkatkan nilai asetnya mengingat terpenting mereka adalah tenaga mereka

(Lanjouwet *al*, 2011). Sehubungan dengan itulah maka investasi pada sektor wisata sangat penting artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk sektor wisata tersebut juga berlaku untuk pemerintah daerah, terlebih setelah berlakunya otonomi daerah, misalnya yang menganalisis respon pengangguran yang ada terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kasus antar provinsi di Indonesia dan kasus antar daerah tingkat dua (Friedman, 2009)

Penanaman modal ternyata bukan hanya merupakan monopoli kegiatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan pengusaha di sektor swasta. Wujud usaha ini dapat berbentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berbagai aktivitasnya untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa, kegiatan penyertaan modal dalam proyek infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta kegiatan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Dari sudut pandang pengklasifikasian jenis penanaman modal seperti ini terlihat cukup luasnya cakupan penanaman modal di suatu daerah.

Pertumbuhan perekonomian daerah dapat dipercepat perkembangannya melalui kehadiran investasi swasta melalui peluncuran program pengembangan wilayah terpadu. Keterpaduan ini terlihat sejak proses pengendalian permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani. Kepastian hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dan pragmatis, biaya pelayanan ditekan seminimal mungkin dan insentif investasi yang sehat diberikan tepat waktu dan tepat sasaran. Jenis sektor atau industri unggulan pun ditetapkan melalui proses pembelajaran secara konsisten dan terencana. Karena memang disadari tidak semua jenis kegiatan investasi PMA akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan pesat.

Penanaman modal secara langsung lebih merupakan pilihan untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah dibandingkan dengan investasi pada investasi porfolio aset keuangan. Hal ini beralasan mengingat jenis investasi yang dilakukan oleh para kreditur, investor finansial, dan investor perseorangan pada aset-aset keuangan (saham, obligasi, asuransi, dsb) tidak memiliki tingkat kepastian pada hasil efek multipliernya yang lebih berkelanjutan.

Artinya jika kita perhatikan kehadiran investasi sektor finansial dalam perspektif kepentingan daerah, umumnya kegiatan-kegiatan investasi pada sektor keuangan dan asuransi sangat rentan (*vulnerable*) pada kejadian-kejadian lingkungan bisnis serta iklim investasi yang ada didaerah tersebut.

### **Penyerapan Tenaga Kerja**

Mutu pekerja ditentukan oleh seberapa besar investasi di dalam modal manusia yang telah dilakukan oleh Becker (1992). Dalam rangka mencari tenaga kerja yang bermutu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni (1) penyiapan tenaga kerja yang terampil, (2) penyiapan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dan (3) pengadaan *job training* atau latihan.

Umumnya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi meningkat sehingga laju pengangguran menurun atau berkurang. Mankiw *et al*, (2013) mengemukakan pengertian tenaga kerja sebagai berikut:

“...tenaga kerja sebagai orang atau kelompok orang-orang yang mampu bekerja, mampu berarti, mampu melakukan kegiatan yang sifatnya mempunyai nilai ekonomi yaitu kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat...”

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Jika ditinjau secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000 Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Namun sejak sensus penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Batas usia tersebut bisa

saja berubah sesuai dengan kondisi yang ada, tujuan dari pemilihan batas umur tersebut supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Permintaan sektor pariwisata terhadap tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.

Di dalam pengertian tenaga kerja itu juga dimaksudkan kelompok yang sedang mencari pekerjaan, bersekolah dan mengurus rumah tangga. Meskipun mereka tidak bekerja tetapi secara fisik mereka mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Inilah alasannya mengapa kelompok ini juga dimaksudkan ke dalam kelompok tenaga kerja. Dua golongan pertama yaitu penduduk yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan disebut angkatan kerja. Sedangkan kelompok yang terakhir yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kelompok lain-lain yang menerima pendapatan disebut bukan angkatan kerja (*potential labor force*). Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa. (Mulyadi, 2008)

Menurut Soeroto (2008), kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan hanya karena tenaga kerja tersebut merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena mereka bekerja atau pekerjaan merupakan sumber utama bagi masyarakat. Dengan memperoleh kesempatan kerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan yang diterima dari pekerjaan tersebut. Ini berarti melibatkan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Karena apabila pendapatan bertambah, maka orang cenderung membelanjakan kebutuhannya lebih meningkat dari pendapatan sebelumnya. Dengan demikian dapat memperluas pasar barang dan jasa.

Tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai sumber energi yang diperlukan di dalam proses produksi dan kekuatan yang dapat menimbulkan pasar, seperti yang dikemukakan oleh Soeroto (2008) bahwa tenaga kerja mempunyai dua fungsi, sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, kedua sebagai searan untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar.

Dari berbagai penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang ada, adalah melalui perluasan kesempatan kerja dengan cara menambah kegiatan ekonomi yang disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas pada seluruh sektor perekonomian yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pengumpulan Data**

Seluruh data dalam penelitian ini adalah bersifat makro, menggunakan data sekunder (*time series*) yang bersifat kuantitatif yaitu data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palopo tentang investasi swasta serta data mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata di Kota Palopo dari tahun 2005-2015. Selain itu, peneliti juga akan melakukan kunjungan ke semua Industri Pariwisata di Kota Palopo serta melakukan wawancara dengan pemilik industri untuk mengetahui tentang tenaga kerja yang dimiliki.

### **Model Analisis**

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja sektor wisata di Kota Palopo, maka digunakan analisis regresi linear (*regression linier*) dengan bantuan SPSS versi 21. Adapun model pada penelitian ini, akan dijabarkan pada persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan

Y = *Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata*

X = *Investasi Swasta*

a = *Konstanta*

$\beta$  = *Koefisien Regresi*

$\varepsilon$  = *error them*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil estimasi penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis, apakah investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor wisata di

Kota Palopo. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS (Lampiran Tabel 1), maka dapat diketahui bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor wisata di Kota Palopo. Hasil total pengaruh, tabel 1 (Lampiran) menunjukkan bahwa total pengaruh dengan melihat besaran nilai koefisien dari penyerapan tenaga kerja dengan nilai 0,909 ini menunjukkan koefisien yang positif, artinya jika terjadi penyerapan tenaga kerja begitu besar, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata di Kota Palopo. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Palopo untuk berperan aktif melalui kebijakan belanja langsung dalam upaya meningkatkan investasi swasta di sektor pariwisata.

Arsyad (2009) menjelaskan bahwa hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan tenaga kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula.

Keynes dalam Lanjouw (2007) mengungkapkan bahwa determinasi utama investasi adalah *marginal efficiency of capital* (MEC), yaitu ukuran tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi atau suatu tingkat diskonto yang menyamakan the present value penerimaan investasi di masa depan dengan *supply price* investasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan yang kurangnya persaingan bekerja dalam sektor wisata yang mana disebabkan minimnya perhatian pemerintah dalam menganggarkan belanja daerah khususnya di sektor pariwisata dan objek wisata yang kurang perhatian atau terabaikan sehingga investor kurang respon berinvestasi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi swasta dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor wisata. Pemerintah Kota Palopo seyogianya membuat aturan yang mempermudah pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Palopo,

sehingga tingkat investasi terutama di sektor pariwisata semakin meningkat, yang tentunya akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Jika tenaga kerja banyak yang terserap oleh industri, maka perekonomian di Kota Palopo juga akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad. Lincolin. (2009). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boediono. (2010). Ekonomi Mikro. BPFE : Yogyakarta
- Friedman, J. (2009). *How Respon sive is poverty to Growth? A Regional Analysis Of Powerty, Inequality, and Growth in Indonesia,1984-99*.UNU.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lanjaww, P.,M.Prudhan, F. saadah,H.Sayed,R.Sparrow. (2007). Powerty, eduation and Health in Indonesia: Who Benefit from public spending?world Bank working paper No.2739. Desember 2001.
- Ramirez, A.,G.Ranis, dan F.Stewart. (2008). ”*Economic Growth and Human Capital.*” QEH Working paper no.18.
- Soeroto. (2006). *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*.BPFE-Pers, Yogyakarta.
- Sukirno. Sadono. (2004). Pengantar Teori Makro Ekonomi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. LPEF Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Makro Ekonomi Modern*.Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. P. (2009). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Erlangga (Terjemahan)